

ana Kas
turkan, j
I terhad
hama t
ak kasu
pa! Tam
ga seka
an mya
nyele
ang
limg
menen
nana
kin b
si si
kac
pe
m
ku
no c
rasan
s
Direktu
ana Sib
skrim Big
minan, ad
pendaya
anak. Se
ah silas
putro, t
rtupat Vi
por
angan m
ngi, Ken
komi
loktran
dan ka
udam, j
pennan
huk
sehsan
perve
sual ana
men
ak. Per
blokt
anatan
konpo
nal jinan
an ba
jelas
pateras
ber
seksu
ap
golan
hukum
menle
samb
myang
men
Namun
se
adikomb
habasi
dan li
/e10/ang

Raw



KLIPING BERITA HUKUM APRIL 2024



Sumber: CNBC Indonesia

Tanggal: 25 April 2024



Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bersalah 8 terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada WIUP PT. Antam Tbk di Blok Mandiodo.

Ke-8 terdakwa tersebut diputuskan bersalah pada kasus Korupsi Nikel Blok Mandiodo pada hari ini, Kamis (25/4/2024).

"Sehubungan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada WIUP PT. Antam Tbk di Blok Mandiodo, telah sampai pada tahap pembacaan putusan terhadap 8 terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 25 April 2024," tulis keterangan resmi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara No. PR-04/P.3.3/L.3/04/2024, Kamis (25/4/2024).

Berikut putusan lengkap kasus Korupsi Nikel Blok Mandiodo:

1. Terdakwa Windu Aji Sutanto, Terdakwa Glen Ario Sudarto dan Terdakwa Ofan Sofwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Terdakwa Ridwan Djamaludin, Terdakwa Sugeng Mujiyanto, Terdakwa Yuli Bintoro, Terdakwa Henry Juliyanto dan Terdakwa Eric Viktor Tambunan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Terdakwa Windu Aji Sutanto diputus pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.135.836.895.000,26 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh enam sen) Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Terdakwa Glen Ario Sudarto diputus pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;

5. Terdakwa Ofan Sofwan diputus pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;

6. Terdakwa Ridwan Djamaludin diputus pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
7. Terdakwa Sugeng Mujiyanto diputus pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
8. Terdakwa Yuli Bintoro diputus pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
9. Terdakwa Henry Juliyanto diputus pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
10. Terdakwa Eric Viktor Tambunan diputus pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan:

Sumber: Tempo
Tanggal: 14 April 2024



Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan keprihatinan atas terjadinya peristiwa kekerasan di Papua selama kurun waktu bulan Maret dan April 2024.

"Komnas HAM menyatakan keprihatinan dan memberikan atensi terhadap setidaknya 12 peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dan menysasar ke anggota TNI/POLRI maupun warga sipil selama kurun waktu bulan Maret dan April 2024," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu.

Dia menyebut setidaknya tercatat empat orang warga sipil dan lima orang anggota TNI/POLRI mengalami luka-luka. Kemudian ada delapan orang meninggal dunia, terdiri atas lima orang anggota TNI/POLRI dan tiga orang warga sipil (satu dewasa dan dua usia anak).

"Serta dua orang perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS)," katanya.

Atnike merinci peristiwa kekerasan yang terjadi pada Maret 2024, di antaranya

kontak tembak antara aparat gabungan TNI-Polri dengan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya (1/3); penembakan dua prajurit TNI yang diduga dilakukan oleh KSB di Kulirik, Puncak Jaya (17/3); Penembakan satu anggota Satgas Kostrad Yonif Raider 323/BP yang diduga dilakukan KSB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak (22/3).

"Serta penembakan yang diduga dilakukan oleh KSB terhadap dua anggota Polri saat berjaga di helipad di Kabupaten Paniai (20/3)," paparnya.

Sedangkan pada April 2024 tercatat dua orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual dan penganiayaan oleh sekelompok orang di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire (5/4). Kemudian terjadi penyerangan terhadap warga sipil, antara lain pembunuhan Kepala Kampung Modusit yang diduga dilakukan KSB di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang (8/4); dan penembakan dua warga sipil yang diduga dilakukan KSB di kios jembatan Yessey Mersey, Kampung Kago, Distrik Ilaga (9/4).

"Selain itu, juga terjadi kontak tembak antara TNI-POLRI dan KSB di Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah (8/4)," ujarnya.

Untuk itu, dalam mencermati situasi konflik dan kekerasan di Papua yang terjadi beberapa waktu belakangan maka Komnas HAM RI mendesak penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, khususnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku aparat penegak hukum.

Sumber: TVONENEWS.COM

Tanggal: 26 April 2024



Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan tindakan penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap wanita di lingkungan kampus kembali terungkap di Universitas Negeri Gorontalo (UNG), ketika seorang oknum dosen Fakultas Hukum berinisial SA dilaporkan ke polisi. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota Kompol Leonardo Widharta membenarkan terkait laporan dugaan penganiayaan dan pelecehan oknum dosen tersebut kepada seorang wanita. Menurutnya, kasus tersebut kini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta setempat Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Leonardo, peristiwa itu berawal saat korban yang hendak mencari informasi perihal hubungan asmara antara terlapor dengan perempuan lainnya. Menurutnya, saat mendatangi rumah terlapor, korban tidak diizinkan masuk dan malah mendapat tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban tidak dapat beraktivitas secara normal. Leonardo menekankan korban juga sempat mendapat tindakan pelecehan seksual dari terlapor pada bulan April 2024. "Kasus ini sedang dalam penyidikan Unit PPA dan sudah dilakukan pemeriksaan

terhadap korban. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan terlapor," kata Leonardo, Kamis (25/4/2024). Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UNG, Weny Almoravid menyampaikan bahwa SA adalah dosen aktif dan saat ini tengah menjalani pelatihan di luar daerah. "Mungkin Senin (29/4/2024) depan yang bersangkutan pulang ke Gorontalo. Kami berkomitmen untuk mengkonfrontasi yang bersangkutan terkait masalah ini," kata Weny. Weny mengaku pihaknya belum dapat memberikan informasi mendalam mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap oknum dosen tersebut, karena masih dalam proses pendalaman. "Kami menghormati proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian," imbuhnya. Tekanannya 120/80, dan pembuluh darahnya seperti berusia 20 tahun! Meskipun masalah itu telah tersebar luas di media sosial, menurut dia, pihaknya masih belum mempelajari secara mendalam. Namun, sebagai pimpinan fakultas, dia yakin dapat menyelesaikan masalah itu dengan transparan.(ant/lgn).

Sumber: tempo.co
Tanggal: 30 April 2024



TEMPO.CO, Jakarta - Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut angka pelaku **judi online** pada 2024 menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2023 terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Jumlah total pejudi dan **tersangka** pada 2023-2024 ada 1.988 kasus dan 3.145 tersangka. "Pelaku judi online merupakan mayoritas masyarakat dengan pendapatan rendah yang memiliki pekerjaan tidak tetap, mayoritas pelaku merupakan para pekerjaan tidak tetap atau pengangguran," kata Trunoyudo dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 29 April 2024.

Trunoyudo menyebut motif dari para pegiat judi online itu karena ingin memiliki kekayaan secara instan. Kondisi ini juga disebut lantaran literasi keuangan yang rendah di masyarakat, akses judi mudah, dan faktor ekonomi. "Selain itu, juga ingin mendapatkan keuntungan yang besar secara mudah," kata dia. Trunoyudo menyebut polisi telah memblokir situs terkait, iklan, dan amplikasi judi online.

Selama medio 2023-2024 itu, Trunoyudo menyebut para pelaku judi online menggunakan berbagai modus untuk menggaet orang ramai dalam permainan haram

ini. Beberapa cara itu, seperti menawarkan judi dengan jackpot di situs tertentu, deposit akan menambah bonus, withdraw atau penarikan uang cepat, dan menanam skrip atau back link di situs tertentu untuk meningkatkan rating platform.

Pemerintah tengah menggodok pembentukan satuan tugas pemberantasan judi online. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap judi online slot yang paling banyak diminati oleh pejudi di Indonesia sejak 2023.

Hadi menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat ada 3,2 juta pejudi online di Indonesia. Sekitar 80 persen bermain di bawah nilai Rp 100 ribu. Meskipun di bawah Rp100 ribu, nilai agregat perputaran uang dari judi online di Indonesia pada tahun 2023, menurut catatan PPATK, mencapai Rp327 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, masih merumuskan langkah penyelesaian pemberantasan judi online yang akan dijalankan oleh satuan tugas alias Satgas pemberantasan judi online. Budi Arie menyebut satgas judi online bisa menjadi upaya pemerintah untuk terus memantau dan memblokir situs judi online. Selain memantau dan memblokir situs, Satgas judi online juga bisa menginvestigasi kebenaran adanya backing yang melindungi bandar judi online.

"Pak Presiden (Joko Widodo) sudah menyampaikan, nanti (Satgas) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Hadi Tjahjanto)," kata dia di Gedung Kominfo pada Jumat, 19 April 2024.

Menurut Budi Arie, aturan Satgas tersebut sudah berada di lintas kementerian lembaga, karena memerlukan penegakan hukum. Sejumlah kementerian dan lembaga seperti kepolisian hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan masuk dalam satgas tersebut. "Kami kan kalau di kominfo nutup aja (take down) nih (situsnya), blokir rekening udah OJK donk, habis blokir rekening apa? Membekukan rekening, itu kan udah urusan penegakan hukum," ucap dia.

Budi menyebut, korban yang terkena dampak negatif dari situs tersebut biasanya ibu-ibu, anak-anak, dan mayoritas anak muda di bawah 17 tahun. Ia mencatat sudah ada 4 orang yang bunuh diri karena terjerat judi online.

Ia juga melaporkan, Kominfo sudah men-take down 6,1 juta situs judi online selama 8 bulan masa jabatannya. Oleh karena itu, kata dia, penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik.

Masyarakat bisa melaporkan situs-situs judi online yang mereka temui ke Kominfo. Budi menegaskan akan men-take down situs tersebut sebagai upaya preventif. Sekaligus menindak para influencer atau pesohor yang mempromosikan judi online.